

**CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud dari transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Sedangkan tujuan dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah menyajikan informasi keuangan yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi belanja, khususnya pada belanja langsung untuk program kegiatan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp.17,612,386,259.00** atau mencapai **92.05%** dari anggarannya.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

d. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2020 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 6.350,802,932.00** yang terdiri dari aset lancar sebesar **Rp. 0,00**, investasi jangka panjang sebesar Rp. 0,00, aset tetap sebesar **Rp. 6,270,838,186.00**, dana cadangan Rp. 0,00 dan aset lainnya sebesar **Rp. 79.964.746,00**.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 0,00**. Dan jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 94,452,156.46**.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada pemerintah Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu;
16. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
17. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasangkayu No 47 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu;
20. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
21. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pasangkayu No 47 Tahun 2019 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020;

1.2. Unsur Laporan Keuangan

- 1.3. Laporan Keuangan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pasangkayu Utara periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu disajikan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Unsur Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Program Pencapaian Target Kinerja

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan Laporan Operasional
- 5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

BAB VI. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi yang ada.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Utara adalah di bidang keuangan dan aset daerah Pemerintah daerah melakukan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan bagi Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Umum pada bidang keuangan dan aset daerah serta Pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektifitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2020, SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu mempunyai 8 program dalam urusan pelayanan umum di bidang keuangan dan aset daerah, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- f. Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah;
- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- g. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan sebesar **Rp.19.133.161.490,00** yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Operasi	18,122,586,490,00
2	Belanja Modal	1.010,575,000.00
JUMLAH		19.133.161.490,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu selama tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1	Pendapatan			
	- Pendapatan Asli Daerah	86.385.000.00	184.686.900,00	213.80
2	Belanja			
	- Belanja Operasi	18,122,586,490,00	16,607,023,759.00	91.64
	- Belanja Modal	1.010,575,000.00	1.005,362,500.00	99.48
JUMLAH		19.133.161.490,00	17,612,386,259.00	92.05

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Belanja Daerah

Realisasi belanja untuk program kegiatan sampai akhir tahun 2020 sebesar **Rp. 17,612,386,259.00** atau mencapai **92,05%**. Dengan demikian jumlah anggaran belanja

yang tidak dapat diserap sebesar **Rp. 328,901,195.30** atau **1,83%** yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
1	2	3	4	
1	Belanja Tidak Langsung	12,754,084,390.00	11,423,870,436.00	98.62
2	Belanja Langsung	6,379,077,100.00	6,188,515,823.00	99.31
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,257,750	12,004,750.00	97.94
2	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	196,202,400	172,662,478.00	88.00
3	Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah	224,772,500	218,772,500.00	97.33
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7,595,000	5,784,500.00	76,16
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	588,897,600	570,460,500.00	96.87
6	Penyediaan Jasa Kebersihan	40,540,550	40,517,000.00	99.94
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12,159,150	12,066,000.00	99.23
8	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	17,250,000	13,500,000.00	98.73
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	1,837,500	0.00	100.00
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	3,720,000	3,615,000.00	97.18
12	Penyediaan makanan dan minuman	36,762,000	36,737,500.00	99.93
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	98,800,250	98,799,900.00	100.00
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	35,212,000	35,212,000.00	100.00

15	Penyediaan Jasa Kantor	12,158,750	12,000,000.00	98.69
16	Pengadaan Mobil Jabatan	885,372,500	885,372,500	100.00
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	0.00	0.00	0.00
18	Pengadaan peralatan gedung kantor	123,365,000	119,990,000.00	97.26
19	Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan	-	0.00	99.76
20	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33,148,000	33,067,145.00	93.85
21	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	32,917,000	30,835,000.00	99.82
22	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	0,00	0,00	0.00
23	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	0.00	0.00	0.00
24	Pelatihan TOT tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	0.00	0.00	0.00
25	Bimtek penatausahaan BMD bagi Pengurus Barang SKPD	0.00	0.00	0.00
26	Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD	5,000,000	5.000,000.00	99.99
27	Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ	3,326,000	0,00	0,00
28	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran (BPKAD)	2,551,000	3,326,000.00	100.00

29	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran (Kabupaten)	172,338,650	167,802,500.00	100.00
30	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (BPKAD)	2,759,000	2,744,000.00	97.37
31	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Kabupaten)	218,055,150	214,113,150.00	100.00
32	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun tentang Aset Daerah (BPKAD)	2,759,000	1,744,000.00	98.42
33	Penyusunan Laporan Barang Pengelola Tahunan	44,126,400	43,311,900.00	63.00
34	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	13,361,750	11,261,750.00	100.00
35	Penyusunan RKBMD, RKPBMMD dan Daftar Pengadaan Barang Milik Daerah	23,371,900	23,371,900.00	100.00
36	Penyusunan Laporan Semesteran Aset Daerah (BPKAD)	2,551,000	2,551,000.00	92.00
37	Penyusunan Laporan Barang Pengelola Semesteran	34,678,650	34,388,850.00	0.00
38	Penyusunan Standar Biaya Umum	75,000,000	63,147,750.00	100.00
39	Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD	30.002.900,00	30.002.900,00	100.00
40	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	817,000,000	795,897,500.00	97.42

41	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	67,800,000	66,852,000.00	98,20
42	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	804,000,000	766,492,050	100.00
40	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67,800,000	67,680,750.00	97.42
41	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	120,000,000	119,686,700.00	99.79
42	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	75,000,000	74,763,500.00	99.78
43	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	0		0
44	Peningkatan Manajemen Aset/barang Daerah	100,440,150	99,709,850.00	99.93
45	Pemeliharaan Aplikasi Simda Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	44,005,000	36,405,000	100.00
46	Pelelangan Barang/Aset Daerah	0		0
47	Penyusunan Pelaporan Dana Transfer	125,380,200	125,156,700	99.51
48	Evaluasi Pengeluaran Belanja SKPD	87,784,000	87,678,000	98.38
50	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	55,680,000	47,227,700	99.99
51	Penyusunan Database SIMGaji Pemda Kab. Mamuju Utara	82,978,300	82,910,100	100.00

52	Bimbingan Teknis Verifikasi SPJ Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	150,000,000	150,000,000.00	97.46
53	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	0		0
54	Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Penerima OPD	0		0
62	Bimbingan Teknis Tentang Pengelolaan Manajemen Keuangan Berbasis Aplikasi	200,000,000	200,000,000.00	100,00
63	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	0		0
64	Bimbingan Teknis Bagi Bendahara Pengeluaran	200,000,000	200,000,000.00	100.00
65	Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Non Pajak	0		0
66	Bimbingan Teknis Penatausahaan Piutang Daerah	0		
67	Sosialisasi Kebijakan Dana Transfer	0		
68	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	150,000,000	150,000,000.00	100
69	Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Pasangkayu	0		
70	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban	150,000,000	150,000,000.00	100

	Belanja Bantuan Keuangan			
71	Penyusunan KUA dan PPAS	25,413,400	25,413,400	100
72	Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan	26,900,600		0
TOTAL		17,612,386,259,-	17,612,386,259,-	97.01

Untuk realisasi keseluruhan belanja, baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung adalah sebesar **Rp. 17,612,386,259.00** atau sebesar **97.01%**. Pada realisasi total belanja ini, nilai realisasi yang di dapat berkurang di banding dengan tahun sebelumnya dikarenakan Penggunaan anggaran pada tahun 2020 di Pakai untuk Penggunaan Dana Covid 19 belanja Pegawai ada sebagian tidak terpakai . Anggaran yang tidak terpakai sebagian besar merupakan belanja Pegawai yakni sebesar Rp. 1.330,213,954.00 atau 2.30%.

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan akan kinerja dan penganggaran yang masih belum dilakukan secara baik dikarenakan beberapa faktor seperti adanya kenaikan harga dalam pengadaan dan lain sebagainya, sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) pada dokumen anggaran (DPPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah aparatur dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya klinik keuangan dan aset, belum tersedianya ruang penyimpanan arsip yang memadai, belum adanya gudang penyimpanan

persediaan ATK dan penyimpanan Barang Milik Daerah, serta banyaknya peralatan perkantoran yang rusak.

4. Koordinasi dan sinkronisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan instansi-instansi yang ada baik di dalam maupun di luar daerah belum optimal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, demikian juga dengan periode tahun sebelumnya. Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 47 Tahun 2020.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas dan sebaliknya bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Perubahan penerapan kebijakan akuntansi mengakibatkan adanya penyajian kembali untuk pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Penerapan basis akrual pertama kalinya, juga menghasilkan Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1. Pendapatan

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

b. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

6. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

a. Pendapatan-LRA

Realisasi Pos Anggaran Pendapatan-LRA pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020, sebesar **Rp.184.686.900,80**.

b. Belanja

Belanja pada umumnya meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dalam Tahun Anggaran 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu terdapat beberapa belanja yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Alokasi anggaran tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu sebesar **Rp.19,133,161,490.00** yang terbagi kedalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pada Belanja Tidak Langsung terdapat anggaran sebesar **Rp. 12,754,084,390.00** dan pada Belanja Langsung sebesar **Rp. 6,379,077,100.00**.Pertanggal 31 Desember 2020, anggaran tersebut telah terealisasi sebesar **Rp. 6,188,515,823.00** atau sebesar **97.01%** dari total anggaran yang ada.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2020 sebagai berikut:

Belanja Operasi

Belanja Operasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2020 sebesar **Rp. 16,607,023,795.00**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2020	2019
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	15.282.879.390.00	13.864.815.436.00	11.222.374.533.00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.839.707.100.00	2.742.208.323.00	5.057.394.204.00
Jumlah		18.122.586.490,00	16.607.023.759,00	16.279.768.737,00

Selanjutnya Belanja Operasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu realisasi tahun 2020 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2020	2019
1	2	3	4	5
	Belanja Tidak Langsung			
1	Belanja Pegawai	15,282,879,390.00	13,864,815.436.00	9,484,254.533.00
	1 Belanja Gaji dan Tunjangan	12,399,484,390.00	11,072,240,156.00	8,851,296,932.00
	2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS	354,600,000.00	351,630,280.00	632,957,601.00
	Belanja Langsung	6.379.077.100.00	6.188.515.823.00	6.411,154,604,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2,839,707,100.00	2,742,208,323.00	5,057,394,204.00
	1 Belanja Bahan Pakai Habis	200.503.400,00	198.624.750,00	357.213.406,00
	2 Belanja Jasa Kantor	265.922.400,00	242.277.478,00	467.623.091,00
	3 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.660.000,00	69.686.645,00	75.997.520,00
	4 Belanja Cetak dan Penggandaan	177.492.000,00	145.030.250,00	286.380.250,00
	7 Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.600.000,00	0,00	15.180.000,00

	8	Belanja Makanan dan Minuman	392.134.000,00	375.108.500,00	345.010.000,00
	10	Belanja Perjalanan Dinas	813.471.300,00	802.673.700,00	1.636.015.122,00
	11	Belanja Pemeliharaan	66.049.000,00	65.932.000,00	34.287.000,00
	12	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	545.725.000,00	545.725.000,00	0.00
	13	Belanja Jasa Konsultasi	297.150.000,00	297.150.000,00	0.00
Jumlah			2,839,707,100.00	2,742,208,323.00	5,057,394,204.00

Belanja Modal

Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu meliputi Belanja Kendaraan, Peralatan, Perlengkapan, Komputer, Meubelair dan Alat-alat lainnya dengan realisasi tahun 2020 **Rp.1.005.362.500,00**. Rincian belanja modal tersebut, sebagai berikut:

No	Belanja Modal	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2020	2019
1	2	3	4	5
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.010.575.000,00	1.005.326.500,00	1.353.760.400,00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan darat bermotor	885.372.500,00	885.372.500,00	275.463.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi/ rapat Pejabat	19.870.000,00	19.870.000,00	13.947.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.912.500,00	6.075.000,00	646.885.400,00

5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	97.420.000,00	94.045.000,00	389.465.000,00
Jumlah		1.010.575.000,00	1.005.326.500,00	6.207,609,400.00

5.2. Penjelasan Laporan Operasional

a. Pendapatan-LO

Realisasi Pos Anggaran Pendapatan-LO pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020, **Rp.184.686.900,80** sedangkan Tahun 2019 adalah Rp. **118.928.352,96**

b. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Selama Tahun 2020 Beban pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu adalah sebesar **Rp. 17,362,895,981.00** dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp. **16,847,196,096.58**, maka mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.228,515,496.41 atau 3,45%.

Beban Operasi

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 13,864,815,436.00, apabila dibandingkan beban

pegawai pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 11,222,374,533.00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.642.438.903,00 atau turun sebesar 23.55%.

2. Beban Persediaan

Beban Persediaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 718,763,500.00, apabila di bandingkan beban Persediaan tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.233,795,656.00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp. (515.032.156,00) atau naik (41,74%)

3. Beban Jasa

Beban Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 1.085.152.478,00, apabila di bandingkan beban jasa tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.930.693.091.00 maka mengalami penurunan sebesar Rp. (845,540,613,00) atau turun (43.79%)

4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 135.618.645,00, apabila di bandingkan beban Pemeliharaan tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 100.997.520.00 maka mengalami penurunan sebesar Rp. 34.621.125,00 atau naik 34.28%

5. Beban Perjalanan Dinas

Beban penyusutan dan amortisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 802,673,700.00, apabila di bandingkan beban Perjalanan Dinas tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.794,076,937.00 maka mengalami penurunan sebesar Rp. (991.403.237,00) atau (55.26%).

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 742.349.442,00

apabila di bandingkan beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 489.975.422.00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp. 252.374.020.00 atau 51.51%

7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 0 apabila di bandingkan beban Penyisihan Piutang tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 0, maka mengalami Penurunan sebesar Rp. 0 atau 0 %.

8. Beban Lain- lain

Beban Lain-lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 13.522.780,00, apabila di bandingkan beban lain- lain tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 12.380.337.00 maka Mengalami Kenaikan sebesar Rp. 1.142.443,- atau 9,23%.

Rincian Beban Pegawai dan Beban Barang dan Jasa, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi (Rp)		Kenaikan/ Penurunan	%
		2020	2019		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN – LO	184.686.900,80	118.928.352,96	162.866.647.04	21.89
2	BEBAN	17,362,895,981.00	16,784,295,496.00	578,600,485.00	3.45
	1 BEBAN OPERASI	17,362,895,981.00	16,784,295,496.00	578,600,485.00	3.45
	Beban Pegawai - LO	13,864,815,436.00	11,222,376,533.00	2,642,438,903.00	23.55
	Beban Persediaan	718,763,500.00	1,233,795,656.00	(515,032,156.00)	(41.74)
	Beban Jasa	1,085,152,478.00	1,930,693,091.00	(845,540,613.00)	(43.79)
	Beban Pemeliharaan	135,618,645.00	100,997,520.00	34,621,125.00	34.28
	Beban Perjalanan dinas	802,673,700.00	1,794,076,937.00	(991,403,237.00)	(55.26)
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	742,349,442.00	489,975,422.00	252,374,020.00	51.51

	Beban Penyisihan Piutang	0	0	0	0.00
	Beban Lain- lain	13,522,780.00	12,380,337.00	1,142,443.00	9.23
	Jumlah	(17,178,209,081.20)	(16,665,367,143.04)	(415,733,837.96)	3.08

9. Surplus/Defisit Laporan Operasional

Dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020, berdasarkan realisasi pendapatan yaitu **Rp. 184.686.900,80** dan realisasi beban **Rp. 17,178,209,081.20**, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu mengalami Surplus/Defisit sebesar Rp. **(17,178,209,081.20)** ini terjadi dikarenakan Pendapatan meningkat 213,80 % di bandingkan dengan Realisasi tahun sebelumnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020.

5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 4.450.844.619.54**. dan Pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. **3.087.888.890.03**

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 adalah sebesar **Rp. (17,178,209,081.20)**, yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit-LO.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2020. Koreksi-koreksi tersebut bernilai **Rp. 0,00**.

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi (Rp)
		2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:	
	1 Koreksi Nilai Persediaan	0.00
	2 Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00
	3 Koreksi ekuitas lainnya	0.00
	4 Mutasi Aset Tetap	1.556.015.878.00
	5 Koreksi terhadap Utang	0.00
	6 Koreksi Perubahan kebijakan Akuntansi	0.00
	7 KEWAJIBAN UNTUK DI KONSOLIDASIKAN	17.330.591.259.00

4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 6.256.350.775,54 dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun 2019 sebesar Rp 4.450.844.619.54,

5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

a. Aset

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Aset Lancar	0.00	0,00
2	Investasi Jangka Panjang	0.00	0.00
3	Aset Tetap	6,270,838,186.00	4,471,679,917.00
4	Dana Cadangan	0.00	0.00
5	Aset Lainnya	73.616.859.00	73.616.859.00
Jumlah		6,350,802,932.00	4,545,296,776.00

1. Aset Lancar

Aset Lancar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2020, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
3	Kas di BLUD	0.00	0.00
	Kas di Bendahara FKTP		
	Kas di Bendahara Bos		
4	Kas Lainnya	0.00	0.00
5	Setara Kas	0.00	0.00
6	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
7	Piutang Pendapatan	31.330.750.00	31.330.750.00
8	Piutang Lainnya	0.00	0.00

9	Penyisihan Piutang	(31.330.750.00)	(31.330.750.00)
10	Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00
11	Persediaan	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00

Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

Kas di Bendahara FKTP

Saldo Kas di bendahara FKTP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**

Kas di Bendahara Bos

Saldo Kas di BLUD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**

Kas Lainnya

Saldo Kas lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

Setara Kas

Saldo pada setara Kas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

Investasi Jangka Pendek

Saldo pada Investasi Jangka Pendek Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00**.

Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 31.330.750.00**.

Piutang Lainnya

Saldo Piutang lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp (31.330.750.00)**

Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban yang dibayar dimuka pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2020, sebesar **Rp. 0.00** berupa persediaan Alat Tulis Kantor yakni Kertas.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Pendek pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00

2	Investasi Jangka Panjang Permanen	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00**.

Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00**.

3. Aset Tetap

Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2020, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Tanah	150,000,000.00	150,000,000.00
2	Peralatan dan Mesin	6,191,231,948.00	6.003.298.186.00
3	Gedung dan Bangunan	.00	1.066.293.534.00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13.470.000.00	13.470.000.00
5	Aset Tetap lainnya	0.00	0.00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0.00	3,526,057,0050.00
7	Akumulasi Penyusutan	(3.609.920.767.00)	(2.762.381.803.00)
Jumlah		6,270,838,186.00	4,471,679,917.00

Tanah

Saldo Tanah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 150.000.000,00.**

Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 6,191,231,948.00.**

Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 3,526,057,005.00.**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 13.470.000.00.**

Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00.**

Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00.**

Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. (3.609.920.767.00)**

4. Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00.**

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Dana Cadangan	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00

5. Aset Lainnya

Aset Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2020, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00
3	Aset tidak Berwujud	0.00	0.00
4	Aset lain-lain	79.964.746,00	73.616.859,00
Jumlah		79.964.746,00	73.616.859,00

Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tagihan Jangka Panjang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00**.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo pada Kemitraan dengan Pihak Ketiga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00**.

Aset tidak Berwujud

Saldo Aset tidak Berwujud Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00**.

Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 79.964.746,00**

b. Kewajiban

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	0.00	0.00
2	Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2020, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
2	Utang Bunga	0.00	0.00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	191.560.255,66.00	94.452.156,46.00
5	Utang Beban	0.00	0.00
6	Utang Jangka Pendek lainnya	0.00	0.00
Jumlah		191.560.255,66.00	94.452.156,46.00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

Utang Bunga

Saldo Utang Bunga pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai saldo pada Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 191.560.255,66,00**.

Utang Beban

Saldo Utang Beban pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020, sebesar **Rp. 0.00**.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2020, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Utang Dalam Negeri	0.00	0.00
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00

Utang Dalam Negeri

Saldo Utang Dalam Negeri pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.0,00**.

c. Ekuitas

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Ekuitas	6,350,802,931.00	4,545,296,776.00
Jumlah		6,350,802,931.00	4,545,296,776.00

1. Ekuitas

Ekuitas Dana Lancar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2020, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Ekuitas	6,350,802,931.00	4,545,296,776.00
Jumlah		6,350,802,931.00	4,545,296,776.00

Ekuitas

Nilai saldo pada Ekuitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 6,350,802,931.00**

BAB IV

PENUTUP

Pada akhir Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 ini, ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan berkenaan dengan Laporan Keuangan SKPD tiap akhir tahun anggaran. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020, telah di susun dengan berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Realisasi Anggaran Tahun 2020 pada anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 dengan penyerapan anggaran sebesar **92.05%** dan telah sesuai dengan target yang diharapkan.
3. Kas pada Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020, adalah **Rp. 0,00**.
4. Neraca SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020, menggambarkan posisi keuangan yakni posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2020, pada Pos Aset Tetap telah dilakukan perhitungan nilai penyusutan Aset yang ada.
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini di susun berdasarkan penggunaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2020.

Demikian Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu yang di buat dan dilaporkan per 31 Desember 2020. Laporan ini disampaikan sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Diharapkan, Laporan Keuangan ini dapat menjadi bahan acuan semua pihak dalam penilaian kinerja instansi pemerintah, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu yang merupakan wujud dari transparansi dan akuntable sesuai dengan yang diamanatkan dalam tata kelola Good Goovernance.

Sekian dan terima kasih.